



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Urusan Pemerintahan adalah ekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR, DAN TIPE

Bagian Kesatu Jenis Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan transmigrasi adalah Dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Nomenklatur perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah Dinas Transmigrasi.
- (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau nomenklatur bersama urusan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Paragraf Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah Dinas Transmigrasi.
- (2) Dinas Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau nomenklatur bersama urusan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas Transmigrasi provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diklasifikasikan atas tipe A, tipe B, dan tipe C.
- (2) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan intensitas urusan pemerintahan.
- (3) Penentuan tipe Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah.

Pasal 6

Hasil perhitungan intensitas urusan transmigrasi pada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Paragraf Kesatu
Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi

Pasal 7

Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Dinas Daerah Provinsi tipe A, Dinas Daerah Provinsi tipe B dan Dinas Daerah Provinsi tipe C.

Pasal 8

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 9

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 10

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah provinsi tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Paragraf Kedua

Dinas Transmigrasi Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 11

Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas Dinas Daerah kabupaten/kota tipe A, Dinas kabupaten/kota tipe B dan Dinas Kabupaten/Kota tipe C.

Pasal 12

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 13

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 14

- (1) Dinas Transmigrasi Daerah kabupaten/kota tipe C terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang/seksi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Dinas Transmigrasi Daerah provinsi dan Dinas Daerah kabupaten/kota digabungkan dengan dinas tipe C atau dinas yang diturunkan tipe lebih rendah dari hasil

pemetaan, maka nomenklatur dinasnya adalah gabungan dari urusan pemerintahan yang digabungkan.

- (2) Dalam hal Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota mendapatkan tambahan bidang atau seksi dari urusan pemerintahan dengan perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan kurang dari 401 maka nomenklatur dinasnya adalah Dinas Transmigrasi.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 16

Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi memperhatikan fungsi daerah asal transmigran, daerah tujuan transmigran, dan daerah asal transmigran yang juga sebagai daerah tujuan transmigran.

Paragraf Kesatu

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi
Dinas Transmigrasi Tipe A

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
- (2) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

Pasal 18

- (1) Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan

kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah.

- (2) Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat.
- (3) Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

Pasal 19

- (1) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang menyiapkan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, menyiapkan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang Pembangunan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi menyiapkan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi, menyiapkan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, dan evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 20

- (1) Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan lahan permukiman, penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kelayakan permukiman.
- (2) Seksi penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penyerasian lingkungan, dan standarisasi prasarana dan sarana.
- (3) Seksi evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Bidang Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, dan penataan dan adaptasi
- (2) Bidang Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan fungsi penyiapan dan pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, dan penataan dan adaptasi.

Pasal 22

- (1) Seksi penyiapan dan pelayanan perpindahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi,

serta monitoring dan evaluasi di bidang penyerasian perpindahan transmigrasi, penampungan, perbekalan, dan pengangkutan dan administrasi perpindahan transmigran.

- (2) Seksi penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pendaftaran, seleksi, dan pembinaan ketrampilan calon transmigran dan penduduk setempat.
- (3) Seksi penataan dan adaptasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi penataan transmigrasi, pembinaan adaptasi dan fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 23

- (1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 24

- (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi.

- (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya.
- (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya.

Paragraf Kedua

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi
Dinas Transmigrasi Tipe B

Pasal 25

- (1) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
- (2) Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.

Pasal 26

- (1) Seksi pembinaan potensi kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan,

perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, serta mediasi dan kerja sama antar daerah.

- (2) Seksi perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat.
- (3) Seksi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan serta dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan.

Pasal 27

- (1) Bidang Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi pembangunan permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.
- (2) Bidang Pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk melaksanakan fungsi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk.

Pasal 28

- (1) Seksi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, standarisasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, dan penyerasian lingkungan.

- (2) Seksi evaluasi prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi penyiapan prasarana dan sarana permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (3) Seksi Penataan Persebaran Penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 29

- (1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 30

- (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,

standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi.

- (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya.
- (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya.

Paragraf Ketiga

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi
Dinas Transmigrasi Tipe C

Pasal 31

- (1) Bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk.
- (2) Bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi melaksanakan fungsi pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan, pembangunan dan pengembangan

permukiman dan kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk.

Pasal 32

- (1) Seksi Perencanaan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan transmigrasi, perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan.
- (2) Seksi pembangunan permukiman transmigrasi melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyiapan lahan, pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana, evaluasi kelayakan permukiman, dan penyerasian lingkungan.
- (3) Seksi penataan persebaran penduduk melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, penempatan, dan penataan dan adaptasi, serta fasilitasi administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 33

- (1) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan
- (2) Bidang pengembangan kawasan transmigrasi melaksanakan fungsi pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya, dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

Pasal 34

- (1) Seksi pengembangan ekonomi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran dan kewirausahaan, promosi dan publikasi, kerjasama kemitraan, dan kelembagaan ekonomi.
- (2) Seksi pengembangan sosial budaya melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan, dan kelembagaan sosial budaya.
- (3) Seksi evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang evaluasi pengembangan ekonomi dan pengembangan sosial budaya.

Paragraf Keempat

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi

Setingkat Bidang

Pasal 35

- (1) Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi setingkat bidang disusun dengan nomenklatur Bidang Transmigrasi.
- (2) Struktur organisasi Bidang Transmigrasi daerah tujuan disusun dengan memperhatikan fungsi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk, serta pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasan transmigrasi.
- (3) Struktur organisasi Bidang Transmigrasi daerah asal atau pengirim disusun dengan memperhatikan fungsi perencanaan dan menyiapkan calon transmigran, peningkatan kapasitas calon transmigran, dan pelayanan perpindahan.

Paragraf Kelima

Uraian tugas dan pengelompokan fungsi
Setingkat Sub Bidang

Pasal 36

- (1) Uraian tugas dan Pengelompokan fungsi urusan transmigrasi setingkat sub bidang disusun dengan nomenklatur sub bidang transmigrasi atau seksi transmigrasi.
- (2) Uraian tugas dan fungsi sub bidang transmigrasi atau seksi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan tahapan penyelenggaraan transmigrasi disesuaikan dengan fungsi daerah asal/daerah pengirim transmigran, daerah tujuan/daerah penerima transmigran, atau daerah asal/daerah pengirim transmigran yang memiliki eks permukiman transmigrasi dan/atau permukiman transmigrasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
ttd.
**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi**
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
WIDODO EKATJAHJANA **dan Tata Laksana**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1884


Eko Bambang Riadi

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
 NOMOR 23 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEDOMAN NOMENKLATUR
 PERANGKAT DAERAH BIDANG
 TRANSMIGRASI

HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA
 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETRANSMIGRASIAN
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|-------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PROVINSI ACEH | 1.056 | BESAR |
| 1.1. | Kab. Aceh Barat | 801 | BESAR |
| 1.2. | Kab. Aceh Besar | 568 | KECIL |
| 1.3. | Kab. Aceh Selatan | 649 | SEDANG |
| 1.4. | Kab. Aceh Singkil | 748 | SEDANG |
| 1.5. | Kab. Aceh Tengah | 882 | BESAR |
| 1.6. | Kab. Aceh Tenggara | 407 | KECIL |
| 1.7. | Kab. Aceh Timur | 433 | KECIL |
| 1.8. | Kab. Aceh Utara | 893 | BESAR |
| 1.9. | Kab. Bireuen | 660 | SEDANG |
| 1.10. | Kab. Pidie | 836 | BESAR |
| 1.11. | Kab. Simelue | 756 | SEDANG |
| 1.12. | Kota Banda Aceh | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 1.13. | Kota Sabang | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 1.14. | Kota Langsa | 119 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 1.15. | Kota Lhokseumawe | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 1.16. | Kab. Gayo Lues | 550 | KECIL |
| 1.17. | Kab. Aceh Barat Daya | 495 | KECIL |
| 1.18. | Kab. Aceh Jaya | 642 | SEDANG |
| 1.19. | Kab. Nagan Raya | 865 | BESAR |
| 1.20. | Kab. Aceh Tamiang | 627 | SEDANG |
| 1.21. | Kab. Bener Meriah | 840 | BESAR |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|-------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 1.22. | Kab. Pidie Jaya | 605 | SEDANG |
| 1.23. | Kota Subulussalam | 911 | BESAR |
| 2. | PROVINSI SUMATERA UTARA | 990 | BESAR |
| 2.1. | Kab. Asahan | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.2. | Kab. Dairi | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.3. | Kab. Deli Serdang | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.4. | Kab. Karo | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 2.5. | Kab. Labuhan Batu | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.6. | Kab. Langkat | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 2.7. | Kab. Mandailing Natal | 264 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 2.8. | Kab. Nias | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.9. | Kab. Simalungun | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.10. | Kab. Tapanuli Selatan | 348 | SANGAT KECIL |
| 2.11. | Kab. Tapanuli Tengah | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 2.12. | Kab. Tapanuli Utara | 396 | SANGAT KECIL |
| 2.13. | Kab. Toba Samosir | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.14. | Kota Binjai | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.15. | Kota Medan | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.16. | Kota Pematang Siantar | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 2.17. | Kota Sibolga | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.18. | Kota Tanjung Balai | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 2.19. | Kota Tebing Tinggi | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.20. | Kota Padang Sidempuan | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 2.21. | Kab. Phakpak Barat | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.22. | Kab. Nias Selatan | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.23. | Kab. Humam Husundutan | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|-------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 2.24. | Kab. Serdang Bedagai | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.25. | Kab. Samosir | 282 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 2.26. | Kab. Batu Bara | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 2.27. | Kab. Padang Lawas | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.28. | Kab. Padang Lawas Utara | 513 | KECIL |
| 2.29. | Kab. Labuhan Batu Selatan | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 2.30. | Kab. Labuhan Batu Utara | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.31. | Kab. Nias Utara | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.32. | Kab. Nias Barat | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 2.33. | Kota Gunung Sitoli | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 3. | PROVINSI SUMATERA BARAT | 1034 | BESAR |
| 3.1. | Kab. Lima Puluh Kota | 400 | KECIL |
| 3.2. | Kab. Agam | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 3.3. | Kab. Kepulauan Mentawai | 518 | KECIL |
| 3.4. | Kab. Padang Pariaman | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 3.5. | Kab. Pasaman | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 3.6. | Kab. Pesisir Selatan | 418 | KECIL |
| 3.7. | Kab. Sijunjung | 554 | KECIL |
| 3.8. | Kab. Solok | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 3.9. | Kab. Tanah Datar | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 3.10. | Kota Bukit Tinggi | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 3.11. | Kota Padang Panjang | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 3.12. | Kota Padang | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 3.13. | Kota Payakumbuh | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 3.14. | Kota Sawahlunto | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 3.15. | Kota Solok | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 3.16. | Kota Pariaman | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 3.17. | Kab. Pasaman Barat | 183 | SANGAT KECIL SEKALI |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|-------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 3.18. | Kab. Dharmasraya | 565 | KECIL |
| 3.19. | Kab. Solok Selatan | 253 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 4. | PROVINSI RIAU | - | *) Tidak terpetakan |
| 4.1. | Kab. Bengkalis | 484 | KECIL |
| 4.2. | Kab. Indragiri Hilir | 1,069 | BESAR |
| 4.3. | Kab. Indragiri Hulu | 293 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 4.4. | Kab. Kampar | 2 | ***) Nihil Urusan Pilihan |
| 4.5. | Kab. Kuantan Singingi | 2 | ***) Nihil Urusan Pilihan |
| 4.6. | Kab. Pelalawan | 2 | ***) Nihil Urusan Pilihan |
| 4.7. | Kab. Rokan Hilir | 220 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 4.8. | Kab. Rokan Hulu | 1042 | BESAR |
| 4.9. | Kab. Siak | 693 | SEDANG |
| 4.10. | Kota Dumai | 407 | KECIL |
| 4.11. | Kota Pekanbaru | 2 | ***) Nihil Urusan Pilihan |
| 4.12. | Kep. Kepulauan Meranti | 2 | ***) Nihil Urusan Pilihan |
| 5. | PROVINSI KEPULAUAN RIAU | 854 | BESAR |
| 5.1. | Kab. Natuna | 1,106 | BESAR |
| 5.2. | Kab. Kep. Anambas | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 5.3. | Kab. Karimun | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 5.4. | Kab. Batam | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 5.5. | Kota Tanjung Pinang | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 5.6. | Kab. Lingga | 652 | SEDANG |
| 5.7. | Kab. Bintan | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 6. | PROVINSI JAMBI | 143 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 6.1. | Kab. Batanghari | 473 | KECIL |
| 6.2. | Kab. Bungo | 535 | KECIL |
| 6.3. | Kab. Kerinci | 462 | KECIL |
| 6.4. | Kab. Merangin | 231 | SANGAT KECIL |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|-------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| | | | SEKALI |
| 6.5. | Kab. Muaro Jambi | 403 | KECIL |
| 6.6. | Kab. Sarolangun | 403 | KECIL |
| 6.7. | Kab. Tanjung Jabung Barat | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 6.8. | Kab. Tanjung Jabung Timur | 469 | KECIL |
| 6.9. | Kab. Tebo | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 6.10. | Kab. Jambi | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 6.11. | Kota Sungai Penuh | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 7. | PROVINSI SUMATERA SELATAN | 913 | BESAR |
| 7.1. | Kab. Lahat | 462 | KECIL |
| 7.2. | Kab. Musi Banyuasin | 601 | SEDANG |
| 7.3. | Kab. Musi Rawas | 572 | KECIL |
| 7.4. | Kab. Muara Ernim | 374 | SANGAT KECIL |
| 7.5. | Kab. Ogan Komering Ilir | 413 | KECIL |
| 7.6. | Kab. Ogan Komering Ulu | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 7.7. | Kota Palembang | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 7.8. | Kota Pagar Alam | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 7.9. | Kota Lubuk Linggau | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 7.10. | Kota Prabumulih | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 7.11. | Kab. Banyuasin | 899 | BESAR |
| 7.12. | Kab. Ogan Ilir | 653 | SEDANG |
| 7.13. | Kab. OKU Timur | 854 | BESAR |
| 7.14. | Kab. OKU Selatan | 231 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 7.15. | Kab. Empat Lawang | 275 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 7.16. | Kab. Penukal Akab Lematang Ilir | 392 | SANGAT KECIL |
| 7.17. | Kab. Musi Rawas Utara | 572 | KECIL |
| 8. | PROVINSI BANGKA BELITUNG | 812 | BESAR |
| 8.1. | Kab. Bangka | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 8.2. | Kab. Belitung | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 8.3. | Kab. Pangkal Pinang | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 8.4. | Kab. Bangka Selatan | 624 | SEDANG |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 8.5. | Kab. Bangka Tengah | 3 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 8.6. | Kab. Bangka Barat | 546 | KECIL |
| 8.7. | Kab. Belitung Timur | 3 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 9. | PROVINSI BENGKULU | 1.190 | BESAR |
| 9.1. | Kab.. Bengkulu Selatan | 559 | KECIL |
| 9.2. | Kab. Bengkulu Utara | 590 | KECIL |
| 9.3. | Kab. Rejang Lebong | 407 | KECIL |
| 9.4. | Kota Bengkulu | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 9.5. | Kab Kaur | 429 | KECIL |
| 9.6. | Kab. Seluma | 451 | KECIL |
| 9.7. | Kab. Mukomuko | 202 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 9.8. | Kab. Lebong | 308 | SANGAT KECIL |
| 9.9. | Kab. Kepahiang | 253 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 9.10. | Kab. Bengkulu Tengah | 433 | KECIL |
| 10. | PROVINSI LAMPUNG | 990 | BESAR |
| 10.1. | Kab. Lampung Barat | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 10.2. | Kab. Lampung Selatan | 506 | KECIL |
| 10.3. | Kab. Lampung Tengah | 403 | KECIL |
| 10.4. | Kab. Lampung Utara | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 10.5. | Kab. Lampung Timur | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 10.6. | Kab. Tanggamus | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 10.7. | Kab. Tulang Bawang | 491 | KECIL |
| 10.8. | Kab. Way Kanan | 352 | SANGAT KECIL |
| 10.9. | Kab. Bandar Lampung | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 10.10. | Kab. Metro | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 10.11. | Kab. Pesawaran | 312 | SANGAT KECIL |
| 10.12. | Kab. Pringsewu | 180 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 10.13. | Kab. Mesuji | 440 | KECIL |
| 10.14. | Kab. Tulang Bawang Barat | 517 | KECIL |
| 10.15. | Kab. Pesisir Barat | 438 | KECIL |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 11. | PROVINSI JAWA BARAT | 1000 | BESAR |
| 11.1. | Kab. Bandung | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.2. | Kab. Bekasi | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.3. | Kab. Bogor | 254 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.4. | Kab. Ciamis | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.5. | Kab. Cianjur | 458 | KECIL |
| 11.6. | Kab. Cirebon | 360 | SANGAT KECIL |
| 11.7. | Kab. Garut | 460 | KECIL |
| 11.8. | Kab. Indramayu | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.9. | Kab. Karawang | 360 | SANGAT KECIL |
| 11.10. | Kab. Kuningan | 410 | KECIL |
| 11.11. | Kab. Majalengka | 350 | SANGAT KECIL |
| 11.12. | Kab. Purwakarta | 240 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.13. | Kab. Subang | 450 | KECIL |
| 11.14. | Kab. Sukabumi | 508 | KECIL |
| 11.15. | Kab. Sumedang | 410 | KECIL |
| 11.16. | Kab. Tasikmalaya | 360 | SANGAT KECIL |
| 11.17. | Kota. Bandung | 246 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.18. | Kota. Bekasi | 246 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.19. | Kota. Bogor | 209 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.20. | Kota. Cirebon | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 11.21. | Kota Depok | 242 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.22. | Kota Sukabumi | 191 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.23. | Kota. Cimahi | 220 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.24. | Kota Tasikmalaya | 231 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.25. | Kota Banjar | 187 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 11.26. | Kab. Bandung Barat | 254 | SANGAT KECIL SEKALI |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 11.27. | Kab. Pangandaran | 320 | SANGAT KECIL |
| 12. | PROVINSI BANTEN | 900 | BESAR |
| 12.1. | Kab. Lebak | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 12.2. | Kab. Pandeglang | 310 | SANGAT KECIL |
| 12.3. | Kab. Serang | 350 | SANGAT KECIL |
| 12.4. | Kab. Tangerang | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 12.5. | Kota. Cilegon | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 12.6. | Kota. Tangerang | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 12.7. | Kota. Serang | 678 | SEDANG |
| 12.8. | Kota. Tangerang Selatan | 180 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13. | PROVINSI JAWA TENGAH | 360 | SANGAT KECIL |
| 13.1. | Kab. Banjarnegara | 234 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.2. | Kab. Banyumas | 200 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.3. | Kab. Batang | 240 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.4. | Kab. Blora | 180 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.5. | Kab. Boyolali | 180 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.6. | Kab. Brebes | 210 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.7. | Kab. Cilacap | 200 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.8. | Kab. Demak | 200 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.9. | Kab. Grobogan | 200 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.10. | Kab. Jepara | 254 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.11. | Kab. Karanganyar | 234 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.12. | Kab. Kebumen | 200 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.13. | Kab. Kendal | 234 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.14. | Kab. Klaten | 256 | SANGAT KECIL SEKALI |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 13.15. | Kab. Kudus | 160 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.16. | Kab. Magelang | 304 | SANGAT KECIL |
| 13.17. | Kab. Pati | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.18. | Kab. Pekalongan | 230 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.19. | Kab. Pemasang | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.20. | Kab. Purbalingga | 230 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.21. | Kab. Purworejo | 234 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.22. | Kab. Rembang | 180 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.23. | Kab. Semarang | 230 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.24. | Kab. Sragen | 234 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.25. | Kab. Sukoharjo | 220 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.26. | Kab. Tegal | 360 | SANGAT KECIL |
| 13.27. | Kab. Temanggung | 180 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.28. | Kab. Wonogiri | 200 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.29. | Kab. Wonosobo | 340 | SANGAT KECIL |
| 13.30. | Kota. Magelang | 154 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.31. | Kota. Pekalongan | 110 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.32. | Kota. Salatiga | 172 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.33. | Kota. Semarang | 235 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.34. | Kota. Surakarta | 160 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 13.35. | Kota. Tegal | 360 | SANGAT KECIL |
| 14. | PROVINSI DI YOGYAKARTA | - | *) Tidak terpetakan |
| 14.1. | Kab. Bantul | 174 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 14.2. | Kab. Gunung Kidul | 280 | SANGAT KECIL SEKALI |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 14.3. | Kab. Kulon Progo | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 14.4. | Kab. Sleman | 304 | SANGAT KECIL |
| 14.5. | Kota. Yogyakarta | 187 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15. | PROVINSI JAWA TIMUR | 970 | BESAR |
| 15.1. | Kab. Bangkalan | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.2. | Kab. Banyuwangi | 510 | KECIL |
| 15.3. | Kab. Blitar | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.4. | Kab. Bojonegoro | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.5. | Kab. Bondowoso | 230 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.6. | Kab. Gresik | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 15.7. | Kab. Jember | 310 | SANGAT KECIL |
| 15.8. | Kab. Jombang | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.9. | Kab. Kediri | 306 | SANGAT KECIL |
| 15.10. | Kab. Lamongan | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.11. | Kab. Lumajang | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.12. | Kab. Madiun | 340 | SANGAT KECIL |
| 15.13. | Kab. Magetan | 230 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.14. | Kab. Malang | 360 | SANGAT KECIL |
| 15.15. | Kab. Mojokerto | 262 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.16. | Kab. Nganjuk | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.17. | Kab. Ngawi | 280 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.18. | Kab. Pacitan | 342 | SANGAT KECIL |
| 15.19. | Kab. Pamekasan | 340 | SANGAT KECIL |
| 15.20. | Kab. Pasuruan | 360 | SANGAT KECIL |
| 15.21. | Kab. Ponorogo | 290 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.22. | Kab. Probolinggo | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 15.23. | Kab. Sampang | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 15.24. | Kab. Sidoarjo | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.25. | Kab. Situbondo | 230 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.26. | Kab. Sumenep | 310 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.27. | Kab. Trenggalek | 456 | KECIL |
| 15.28. | Kab. Tuban | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.29. | Kab. Tulungagung | 250 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.30. | Kab. Blitar | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 15.31. | Kab. Kediri | 198 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.32. | Kab. Madiun | 194 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.33. | Kab. Malang | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 15.34. | Kab. Mojokerto | 231 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.35. | Kab. Pasuruan | 187 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 15.36. | Kab. Probolinggo | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 15.37. | Kab. Surabaya | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 15.38. | Kab. Batu | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 16. | PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 714 | SEDANG |
| 16.1. | Kab. Bengkayang | 407 | KECIL |
| 16.2. | Kab. Landak | 572 | KECIL |
| 16.3. | Kab. Kapuas Hulu | 454 | KECIL |
| 16.4. | Kab. Ketapang | 880 | BESAR |
| 16.5. | Kab. Mempawah | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 16.6. | Kab. Sambas | 770 | SEDANG |
| 16.7. | Kab. Sanggau | 792 | SEDANG |
| 16.8. | Kab. Sintang | 352 | SANGAT KECIL |
| 16.9. | Kab. Pontianak | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 16.10. | Kab. Singkawang | 389 | SANGAT KECIL |
| 16.11. | Kab. Sekadu | 715 | SEDANG |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 16.12. | Kab. Melawi | 352 | SANGAT KECIL |
| 16.13. | Kab. Kayong Utara | 675 | SEDANG |
| 16.14. | Kab. Kubu Raya | 552 | KECIL |
| 17. | PROVINSI KALIMANTAN TENGAH | - | *) Tidak terpetakan |
| 17.1. | Kab. Barito Selatan | 860 | BESAR |
| 17.2. | Kab. Barito Utara | 741 | SEDANG |
| 17.3. | Kab. Kapuas | 946 | BESAR |
| 17.4. | Kab. Kotawaringin Barat | 1.043 | BESAR |
| 17.5. | Kab. Kotawaringin Timur | 788 | SEDANG |
| 17.6. | Kab. Palangkaraya | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 17.7. | Kab. Katingan | 975 | BESAR |
| 17.8. | Kab. Seruyan | 880 | BESAR |
| 17.9. | Kab. Sukamara | 682 | SEDANG |
| 17.10. | Kab. Lamandau | 565 | KECIL |
| 17.11. | Kab. Gunung Mas | 605 | SEDANG |
| 17.12. | Kab. Pulau Pisau | 667 | SEDANG |
| 17.13. | Kab. Murung Raya | 607 | SEDANG |
| 17.14. | Kab. Barito Timur | 858 | BESAR |
| 18. | PROVINSI KALIMANTAN SELATAN | | |
| 18.1. | Kab. Banjar | 660 | SEDANG |
| 18.2. | Kab. Barito Kuala | 671 | SEDANG |
| 18.3. | Kab. Hulu Sungai Selatan | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 18.4. | Kab. Hulu Sungai Tengah | 517 | KECIL |
| 18.5. | Kab. Hulu Sungai Utara | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 18.6. | Kab. Kota Baru | 913 | BESAR |
| 18.7. | Kab. Tabalong | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 18.8. | Kab. Tanah Laut | 407 | KECIL |
| 18.9. | Kab. Tapin | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 18.10. | Kota. Banjar Baru | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 18.11. | Kota. Banjarmasin | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 18.12. | Kab. Balangan | 594 | KECIL |
| 18.13. | Kab. Tanah Bumbu | 572 | KECIL |
| 19. | PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | 902 | BESAR |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|--|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 19.1. | Kab. Kutai Kartenegara | 1,023 | BESAR |
| 19.2. | Kab. Kutai Barat | 660 | SEDANG |
| 19.3. | Kab. Kutai Timur | 964 | BESAR |
| 19.4. | Kab. Paser | 882 | BESAR |
| 19.5. | Kab. Balikpapan | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 19.6. | Kab. Bontang | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 19.7. | Kab. Samarinda | 264 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 19.8. | Kab. Berau | 568 | KECIL |
| 19.9. | Kab. Penajam Paser Utara | 788 | SEDANG |
| 19.10. | Kab. Mahakam Hulu | 891 | BESAR |
| 20. | PROVINSI KALIMANTAN UTARA | 726 | SEDANG |
| 20.1. | Kab. Bulungan | 961 | BESAR |
| 20.2. | Kab. Malinau | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 20.3. | Kab. Nunukan | 647 | SEDANG |
| 20.4. | Kab. Tarakan | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 20.5. | Kab. Tana Tidung | 1,072 | BESAR |
| 21. | PROVINSI SULAWESI UTARA | 902 | BESAR |
| 21.1. | Kab. Bolang Mongondow | 629 | SEDANG |
| 21.2. | Kab. Minahasa | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 21.3. | Kab. Kepulauan Sangihe | 336 | SANGAT KECIL |
| 21.4. | Kota. Bitung | 293 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 21.5. | Kota. Manado | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 21.6. | Kab. Kepulauan Talaud | 322 | SANGAT KECIL |
| 21.7. | Kab. Minahasa Selatan | 407 | KECIL |
| 21.8. | Kota Tomohon | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 21.9. | Kab. Minahasa Utara | 286 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 21.10. | Kota Kotamobago | 99 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 21.11. | Kab. Bolaang Mongondow Utara | 341 | SANGAT KECIL |
| 21.12. | Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bitaro | 143 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 21.13. | Kab. Minahasa Tenggara | 387 | SANGAT KECIL |
| 21.14. | Kab. Bolaang Mangondow Timur | 794 | SEDANG |
| 21.15. | Kab. Bolaang Mangondow Selatan | 319 | SANGAT KECIL |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 22. | PROVINSI GORONTALO | 700 | SEDANG |
| 22.1. | Kab. Boalemo | 757 | SEDANG |
| 22.2. | Kab. Gorontalo | 521 | KECIL |
| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BESAR KERJA | |
| | | SKOR | KATEGORI |
| 22.3. | Kota. Gorontalo | 1 | *) Tidak Trepetakan |
| 22.4. | Kab. Pohuwato | 519 | KECIL |
| 22.5. | Kab. Bone Bolango | 319 | SANGAT KECIL |
| 22.6. | Kab. Gorontalo Utara | 583 | KECIL |
| 23. | PROVINSI SULAWESI TENGAH | 704 | SEDANG |
| 23.1. | Kab. Banggai | 574 | KECIL |
| 23.2. | Kab. Banggai Kepulauan | 638 | SEDANG |
| 23.3. | Kab. Buol | 788 | SEDANG |
| 23.4. | Kab. Toli-toli | 601 | SEDANG |
| 23.5. | Kab. Donggala | 530 | KECIL |
| 23.6. | Kab. Morowali | 660 | SEDANG |
| 23.7. | Kab. Poso | 565 | KECIL |
| 23.8. | Kota. Palu | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 23.9. | Kab. Parigi Moutung | 499 | KECIL |
| 23.10. | Kab. Tojo Una Una | 495 | KECIL |
| 23.11. | Kab. Sigi | 407 | KECIL |
| 23.12. | Kab. Banggai Laut | 440 | KECIL |
| 23.13. | Kab. Morowali Utara | 400 | KECIL |
| 24. | PROVINSI SULAWESI SELATAN | 1.045 | BESAR |
| 24.1. | Kab. Bantaeng | 242 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 24.2. | Kab. Barru | 271 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 24.3. | Kab. Bone | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 24.4. | Kab. Bulukumba | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 24.5. | Kab. Enrekang | 537 | KECIL |
| 24.6. | Kab. Gowa | 455 | KECIL |
| 24.7. | Kab. Jeneponto | 420 | KECIL |
| 24.8. | Kab. Luwu | 550 | KECIL |
| 24.9. | Kab. Luwu Utara | 909 | BESAR |
| 24.10. | Kab. Maros | 748 | SEDANG |
| 24.11. | Kab. Pangkajene Kepulauan | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 24.12. | Kota Palopo | 440 | KECIL |
| 24.13. | Kab. Luwu Timur | 682 | SEDANG |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 24.14. | Kab. Pinrang | 583 | KECIL |
| 24.15. | Kab. Sinjai | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 24.16. | Kab. Kepulauan Selayar | 532 | KECIL |
| 24.17. | Kab. Sidenreng Rappang | 510 | KECIL |
| 24.18. | Kab. Soppeng | 455 | KECIL |
| 24.19. | Kab. Takalar | 671 | SEDANG |
| 24.20. | Kab. Tana Toraja | 620 | SEDANG |
| 24.21. | Kab. Wajo | 539 | KECIL |
| 24.22. | Kota Pare-pare | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 24.23. | Kota. Makasar | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 24.24. | Kab. Toraja Utara | 455 | KECIL |
| 25. | PROVINSI SULAWESI BARAT | 528 | KECIL |
| 25.1. | Kab. Majene | 594 | KECIL |
| 25.2. | Kab. Mamuju | 744 | SEDANG |
| 25.3. | Kab. Polewali Mandar | 997 | BESAR |
| 25.4. | Kab. Mamasa | 920 | BESAR |
| 25.5. | Kab. Mamuju Utara | 548 | KECIL |
| 25.6. | Kab. Mamuju Tengah | 647 | SEDANG |
| 26. | PROVINSI SULAWESI TENGGARA | 913 | BESAR |
| 26.1. | Kab. Buton | 704 | SEDANG |
| 26.2. | Kab. Konawe | 972 | BESAR |
| 26.3. | Kab. Kolaka | 627 | SEDANG |
| 26.4. | Kab. Muna | 605 | SEDANG |
| 26.5. | Kota. Kendari | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 26.6. | Kota. Bau-bau | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 26.7. | Kab. Konawe Selatan | 937 | BESAR |
| 26.8. | Kab. Bombana | 385 | SANGAT KECIL |
| 26.9. | Kab. Wakatobi | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 26.10. | Kab. Kolaka Utara | 260 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 26.11. | Kab. Konawe Utara | 805 | BESAR |
| 26.12. | Kab. Buton Utara | 924 | BESAR |
| 26.13. | Kab. Konawe Kepulauan | 280 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 26.14. | Kab. Kolaka Timur | 715 | SEDANG |
| 26.15. | Kab. Muna Barat | 944 | BESAR |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 26.16. | Kab. Buton Tengah | 560 | KECIL |
| 26.17. | Kab. Buton Selatan | 350 | SANGAT KECIL |
| 27. | PROVINSI BALI | - | *) Tidak terpetakan |
| 27.1. | Kab. Bandung | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 27.2. | Kab. Bangli | 210 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 27.3. | Kab. Buleleng | 290 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 27.4. | Kab. Gianyar | 360 | SANGAT KECIL |
| 27.5. | Kab. Jembrana | 210 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 27.6. | Kab. Karangasem | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 27.7. | Kab. Klungkung | 200 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 27.8. | Kab. Tabanan | 220 | *) Tidak terpetakan |
| 27.9. | Kota Denpasar | 1 | *) Tidak terpetakan |
| 28. | PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 756 | SEDANG |
| 28.1. | Kab. Bima | 495 | KECIL |
| 28.2. | Kab. Dompu | 352 | SANGAT KECIL |
| 28.3. | Kab. Lombok Barat | 290 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 28.4. | Kab. Lombok Tengah | 702 | SEDANG |
| 28.5. | Kab. Lombok Timur | 432 | KECIL |
| 28.6. | Kab. Sumbawa | 713 | SEDANG |
| 28.7. | Kota Mataram | 187 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 28.8. | Kota Bima | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 28.9. | Kab. Sumbawa Barat | 535 | KECIL |
| 28.10. | Kab. Lombok Utara | 2 | ***) Nihil (Urusan Pilihan) |
| 29. | PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 696 | SEDANG |
| 29.1. | Kab. Alor | 939 | BESAR |
| 29.2. | Kab. Belu | 1,126 | BESAR |
| 29.3. | Kab. Ende | 864 | BESAR |
| 29.4. | Kab. Flores Timur | 259 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 29.5. | Kab. Kupang | 792 | SEDANG |
| 29.6. | Kab. Lembata | 252 | SANGAT KECIL |

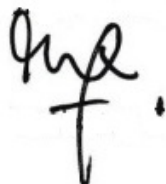
| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| | | | SEKALI |
| 29.7. | Kab. Manggarai | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 29.8. | Kab. Ngada | 794 | SEDANG |
| 29.9. | Kab. Sikka | 638 | SEDANG |
| 29.10. | Kab. Sumba Barat | 825 | BESAR |
| 29.11. | Kab. Sumba Timur | 1,032 | BESAR |
| 29.12. | Kab. Timor Tengah Selatan | 621 | SEDANG |
| 29.13. | Kab. Timor Tengah Utara | 1,077 | BESAR |
| 29.14. | Kota Kupang | 365 | SANGAT KECIL |
| 29.15. | Kab. Rote Ndao | 855 | BESAR |
| 29.16. | Kab. Manggarai Barat | 492 | KECIL |
| 29.17. | Kab. Nagekeo | 784 | SEDANG |
| 29.18. | Kab. Sumba Barat Daya | 1,196 | BESAR |
| 29.19. | Kab. Sumba Tengah | 549 | KECIL |
| 29.20. | Kab. Manggarai Timur | 574 | KECIL |
| 29.21. | Kab. Sabu Raijua | 1,230 | BESAR |
| 29.22. | Kab. Malaka | 630 | SEDANG |
| 30. | PROVINSI MALUKU | 957 | BESAR |
| 30.1. | Kab. Maluku Tenggara Barat | 591 | KECIL |
| 30.2. | Kab. Maluku Tengah | 918 | BESAR |
| 30.3. | Kab. Maluku Tenggara | 406 | KECIL |
| 30.4. | Kab. Buru | 727 | SEDANG |
| 30.5. | Kota Ambon | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 30.6. | Kab. Seram Bagian Barat | 288 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 30.7. | Kab. Seram Bagian Timur | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 30.8. | Kab. Kepulauan Aru | 618 | SEDANG |
| 30.9. | Kota Tual | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 30.10. | Kab. Maluku Barat Daya | 264 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 30.11. | Kab. Buru Selatan | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 31. | PROVINSI MALUKU UTARA | 840 | BESAR |
| 31.1. | Kab. Halmahera Tengah | 878 | BESAR |
| 31.2. | Kota Ternate | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 31.3. | Kab. Halmahera Barat | 730 | SEDANG |
| 31.4. | Kab. Halmahera Timur | 773 | SEDANG |
| 31.5. | Kab. Halmahera Selatan | 588 | KECIL |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 31.6. | Kab. Halmahera Utara | 607 | SEDANG |
| 31.7. | Kab. Kepulauan Sula | 787 | SEDANG |
| 31.8. | Kota. Tidore Kepulauan | 490 | KECIL |
| 31.9. | Kab. Pulau Morotai | 713 | SEDANG |
| 31.10. | Kab. Pulau Taliabu | 1,080 | BESAR |
| 32. | PROVINSI PAPUA | 504 | KECIL |
| 32.1. | Kab. Biak Numfor | 280 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 32.2. | Kab. Jayapura | 1,008 | BESAR |
| 32.3. | Kab. Jayawijaya | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.4. | Kab. Merauke | 722 | SEDANG |
| 32.5. | Kab. Mimika | 1,092 | BESAR |
| 32.6. | Kab. Nabire | 1,120 | BESAR |
| 32.7. | Kab. Paniai | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.8. | Kab. Puncak Jaya | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.9. | Kab. Kepulauan Yapen | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.10. | Kota. Jayapura | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.11. | Kab. Sarmi | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 32.12. | Kab. Keerom | 641 | SEDANG |
| 32.13. | Kab. Yahukimo | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.14. | Kab. Pegunungan Bintang | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.15. | Kab. Tolikara | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.16. | Kab. Boven Digoel | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 32.17. | Kab. Mappi | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 32.18. | Kab. Asmat | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 32.19. | Kab. Wropen | 185 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 32.20. | Kab. Supiori | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.21. | Kab. Membramo Raya | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.22. | Kab. Mamberamo Tengah | 238 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 32.23. | Kab. Yalimo | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.24. | Kab. Lanny Jaya | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 32.25. | Kab. Nduga | 2 | ** Nihil (Urusan Pilihan) |
| 32.26. | Kab. Dogiya | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.27. | Kab. Puncak | 1 | *) Tidak Terpetakan |

| NO | PROVINSI/KABUPATEN/KOTA | TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA | |
|--------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|
| | | SKOR | KATEGORI |
| 32.28. | Kab. Intan Jaya | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 32.29. | Kab. Deiya | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 33. | PROVINSI PAPUA BARAT | 826 | BESAR |
| 33.1. | Kab. Fak Fak | 711 | SEDANG |
| 33.2. | Kab. Manokwari | 787 | SEDANG |
| 33.3. | Kab. Sorong | 616 | SEDANG |
| 33.4. | Kota. Sorong | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 33.5. | Kab. Raja Ampat | 479 | KECIL |
| 33.6. | Kab. Sorong Selatan | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 33.7. | Kab. Teluk Bintuni | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 33.8. | Kab. Teluk Wondama | 588 | KECIL |
| 33.9. | Kab. Kaiman | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 33.10. | Kab. Maybrat | 518 | KECIL |
| 33.11. | Kab. Tambrau | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 33.12. | Kab. Manokwari Selatan | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 33.13. | Kab. Pegunungan Arfak | 1 | *) Tidak Terpetakan |
| 34. | PROVINSI DKI JAKARTA | - | *) Tidak Terpetakan |
| 34.1. | Kota. Jakarta Pusat | 176 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 34.2. | Kota. Jakarta Timur | 187 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 34.3. | Kota. Jakarta Selatan | 187 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 34.4. | Kota. Jakarta Barat | 176 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 34.5. | Kota. Jakarta Utara | 176 | SANGAT KECIL SEKALI |
| 34.6. | Kab. Kepulauan Seribu | 1 | *) Tidak Terpetakan |

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Kepala Biro Hukum, Organisasi,
dan Tata Laksana



Eko Bambang Riadi

EKO PUTRO SANDJOJO